

Laporan
Hasil Penelitian Hibah Bersaing
Tahun Anggaran 2012



Model Kebijakan Penyadapan Berdimensi Hak Asasi Manusia
dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

Tim Peneliti:

Amira Paripurna, S.H., LL.M.

Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.

Dibiayai oleh DIPA Universitas Airlangga, sesuai dengan Surat Keputusan
Rektor Tentang Kegiatan Penelitian Hibah Bersaing Tahun Anggaran 2012
Nomor: 2613/H3/KR/2012, Tanggal 9 Maret 2012

Universitas Airlangga
2012

ABSTRACT

Wiretapping or in legal terms is called interception has two contradictory aspects. The use of wiretapping method to support investigation is very useful to find critical evidences which can be used to prove criminal conduct of suspect but on the other hand it is considered as a violation of the privacy rights of citizens which includes the privacy of their personal life, family life and correspondence. There are some regulations on interception that contains procedures for law enforcement officers to do interception but they are still spreading in some regulation and legislation. There is no harmonization and synchronization in rules and procedures; accountability and control mechanisms use of wiretapping by law enforcement officers; and complaints mechanisms for someone who felt their privacy rights has been violated on the wiretap investigation. This research aimed to formulate the model of policies on interception which have the human rights dimension in order to eliminate corruption in Indonesia.

Keywords: Interception, Human Right, Corruption

ABSTRAK

Penyadapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia memiliki dua aspek yang kontradiktif. Di satu sisi, penggunaan metode penyadapan dalam proses penyidikan adalah sangat penting karena dapat dengan mudah mengumpulkan bukti yang dapat digunakan untuk proses pembuktian. Akan tetapi di sisi lain akan proses penyadapan yang dilakukan tanpa prosedur pelaksanaan yang benar dapat berpotensi besar terhadap pelanggaran hak asasi manusia terutama pada hak-hak privasi. Sebenarnya telah banyak pengaturan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal tata cara dan prosedur melakukan penyadapan tetapi masih tersebar dalam beberapa produk perundang-undangan, baik legislası ataupun regulasi. Semua peraturan tersebut dapat dikatakan masih belum harmonis antara satu dengan lainnya sehingga sangat berpotensi terjadinya konflik antara norma-norma yang terkandung didalamnya. Akuntabilitas dan mekanisme control bagi para penegak hukum dalam menggunakan kewenangan dan mekanisme complain atas pelanggaran yang dilakukan oleh aparat adalah dua contoh perıhal yang sangat signifikan berkaitan dengan penyadapan. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mencari formulasi yang terbaik bagi standard pelaksanaan dan penggunaan metode penyadapan yang berdasarkan pada hak asasi manusia.